

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Simpulan

Simpulan ini disusun merujuk pada temuan dan pembahasan penelitian mengenai manajemen mutu proses pembelajaran di Unsika. Secara umum manajemen mutu proses pembelajaran di Unsika mencakup tujuh unsur mutu yakni filosofi mutu (*quality philosophy*), standar mutu (*quality standard*), tujuan kebijakan mutu (*quality goals*), struktur mutu (*quality structures*), proses yang bermutu (*quality process*), siklus pengendalian mutu (*quality control circle*) dan penilaian mutu (*quality evaluation*). Tujuh unsur mutu ini membentuk keterpaduan dalam mengelola komponen-komponen utama (*essential component*) dalam penyelenggaraan proses pembelajaran seperti pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen, program pemenuhan *learning needs* mahasiswa, perancangan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, penyediaan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan serta penyediaan daya dukung pendanaan yang memadai, unsur-unsur tersebut dikelola secara efektif dan efisien sehingga terselenggara proses pembelajaran yang bermutu.

Berdasarkan simpulan umum tersebut peneliti merumuskan simpulan yang bersifat khusus, dimulai dari kebijakan mutu (*quality policy*) yang diimplementasikan lebih memprioritaskan kepada pembangunan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen dari pada pembangunan yang bersifat infrastruktur, karena berangkat dari sebuah analisa bahwa pengembangan dosen merupakan kebijakan mutu yang memberi dampak jangka panjang dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu. Dalam kebijakan mutu proses pembelajaran mengandung tiga unsur mutu yang meliputi nilai-nilai filosofi yang mendasari kebijakan mutu proses pembelajaran di Unsika, standar mutu yang menjadi tolok ukur acuan mutu proses pembelajaran serta meletakkan tujuan mutu sebagai *output* yang dicapai dalam proses pembelajaran tersebut.

Kebutuhan belajar (*learning needs*) mahasiswa merupakan aspirasi atau harapan yang menjadi dasar bagi mahasiswa dalam memilih universitas untuk mereka menempuh pendidikan, adapun kebutuhan belajar mahasiswa Unsika yang

telah terinventarisasi sangat bervariasi mulai dari penguasaan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penguasaan kemampuan berwirausaha, kemampuan mencipta dan berinovasi serta kemampuan berkomunikasi secara sosial. Namun institusi masih menemukan kendala dalam mengakomodir atau mengadaptasi berbagai kebutuhan belajar tersebut ke dalam kebijakan perancangan dan pengembangan kurikulum yang diimplementasikan melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen di kelas.

Semakin bervariasinya latar belakang demografi mahasiswa sejalan dengan semakin bervariasinya karakteristik dan potensi (*learning potential*) yang dimilikinya, perbedaan karakteristik yang dimiliki mahasiswa merupakan wahana pembelajaran mengenai makna kebhinekaan, persaudaraan, toleransi, kebersamaan, dan menjadi wadah untuk belajar berkomunikasi dalam lingkungan sosial yang heterogen serta sebagai belajar mengenai makna persatuan sebagai bagian dari bangsa yang besar. Perbedaan karakteristik tersebut melahirkan beragam potensi, minat serta bakat mahasiswa yang diapresiasi serta diakomodir oleh universitas ke dalam berbagai kebijakan dan program baik akademik maupun non akademik.

Berkaitan dengan manajemen kurikulum di universitas meliputi kegiatan perancangan kurikulum (*curriculum design*), pelaksanaan kurikulum (*curriculum implementation*), dan pengembangan kurikulum (*curriculum development*). Pengembangan kurikulum yang dilakukan saat ini belum menempatkan kebutuhan belajar (*learning needs*) mahasiswa dan harapan (*expectation stakeholder*) sebagai dasar dan orientasi pengembangan kurikulum, atau dengan kata lain belum menempatkan mahasiswa sebagai subjek (*child oriented*). Kurikulum saat ini dikembangkan untuk mengarahkan mahasiswa dalam menguasai sejumlah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, bukan dirancang untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian dan kemampuan yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar mahasiswa.

Dosen merupakan komponen utama pelaksana proses pembelajaran, pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen merupakan kebijakan prioritas yang menjadi perhatian institusi, program-program pengembangan telah dilaksanakan baik yang diselenggarakan oleh program studi secara khusus maupun

yang dilaksanakan secara koordinatif oleh universitas. Peningkatan dalam hal jumlah dosen yang telah memiliki jabatan akademik, dosen yang telah memiliki sertifikat sebagai pendidik profesional, sampai kepada peningkatan kuantitas dosen yang melaksanakan studi lanjut merupakan gambaran pengembangan kompetensi dan kualifikasi dosen yang dilaksanakan oleh institusi.

Berkenaan dengan sumber daya pendukung proses pembelajaran, disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan komponen yang menjadi perhatian utama kebijakan institusi, pengembangan aspek kualifikasi dan kompetensi menjadi perhatian serius dari institusi, di mana institusi berupaya mendorong serta memfasilitasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualifikasi serta kompetensinya sehingga mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh *stakeholder*. Kemudian sebagai perguruan tinggi negeri yang berstatus perguruan tinggi Satuan Kerja (Satker) pola pengelolaan keuangan masih mengikuti pola keuangan negara, sehingga masih menghadapi sejumlah kendala dalam hal keleluasaan serta otonomi untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Jika ditinjau dari alokasi anggaran, sebagian besar alokasi anggaran institusi digunakan untuk alokasi gaji dosen dan tunjangan sertifikasi dosen, selain itu dialokasikan untuk investasi sarana dan prasarana, dan investasi sumber daya manusia, artinya alokasi anggaran institusi sudah memprioritaskan anggaran pada penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu. Selanjutnya pengembangan fasilitas belajar masih belum menjadi kebijakan prioritas yang diimplementasikan oleh institusi, sehingga jika ditinjau dari aspek ketersediaan dan kegunaannya masih menghadapi sejumlah kendala untuk dapat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Selain itu kendala utama muncul dari masih lemahnya aspek perawatan (*maintenance*) serta tata kelola terhadap fasilitas yang dimiliki, sehingga pada saat digunakan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Proses pembelajaran yang diselenggarakan di universitas memiliki karakteristik tersendiri, secara umum karakteristik proses pembelajaran yang diselenggarakan di Unsika masih menerapkan pola pembelajaran konvensional dengan mengedepankan dosen sebagai sumber belajar dan menjadikan pertemuan klasikal sebagai aktivitas pembelajaran utama. Namun sebagian terdapat dosen

sudah mulai mengembangkan pendekatan belajar yang lebih inovatif dan mengadaptasi serta mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam proses pembelajaran.

Unsika memberi kewenangan kepada dosen untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan kondisi kelas yang dihadapi, proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh dosen yang telah memiliki kualifikasi sesuai yang diprasyaratkan oleh institusi, seperti kepemilikan jabatan akademik minimal Asisten Ahli. Sehingga dosen yang belum memiliki jabatan akademik tidak diperbolehkan untuk melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran secara mandiri, namun harus didampingi oleh dosen senior yang telah memiliki jabatan fungsional dan memiliki sertifikasi sebagai pendidik profesional, hal ini dilakukan sebagai bentuk pendampingan kepada dosen yang belum memiliki jabatan akademik dalam meningkatkan kapabilitas sebagai dosen profesional, sehingga mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu.

Universitas memberikan keleluasan kepada dosen untuk melaksanakan proses evaluasi terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan, menentukan instrumen evaluasi yang digunakan dalam mengevaluasi proses pembelajaran, serta melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakannya di kelas. Namun masih ditemukan ketidakseragaman acuan dalam penilaian proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi yang disebabkan institusi yang masih menemui sejumlah kendala dalam mensosialisasikan Pedoman Akademik yang telah ditetapkan oleh institusi kepada seluruh sivitas akademika.

Manajemen mutu proses pembelajaran di Unsika telah memberikan perhatian pada sistem tata kelola seluruh komponen-komponen utama (*essential componet*) penyusun proses pembelajaran seperti dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang unggul, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan belajar dan tuntutan pengguna (*user*) lulusan, ketersediaan fasilitas belajar yang memadai, ketersediaan anggaran yang memadai serta tata kelola yang efektif sehingga tercipta *interconnection* dari seluruh komponen tersebut, namun masih menghadapi sejumlah kendala dalam memenuhi standar mutu (*quality standard*) yang telah ditetapkan secara maksimal.

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan pada simpulan yang diuraikan di atas, dikemukakan implikasi penelitian yang pertama bahwa kebijakan mutu yang dilaksanakan oleh Unsika lebih menempatkan pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen sebagai prioritas utama dalam menciptakan proses pembelajaran bermutu sehingga berimplikasi pada kebijakan pengembangan infrastruktur belum menjadi perhatian utama dari pimpinan universitas dalam mendukung proses pembelajaran. Implikasi yang kedua adalah universitas masih menghadapi kendala dalam mengakomodir kebutuhan belajar mahasiswa (*learning mahasiswa*) dalam proses perancangan dan pengembangan kurikulum berimplikasi pada kurikulum yang diimplementasikan belum menggambarkan kebutuhan belajar mahasiswa namun lebih kepada akomodasi terhadap harapan dan tuntutan dunia kerja sehingga mahasiswa lebih diposisikan sebagai objek belajar bukan sebagai subjek belajar.

Implikasi yang ketiga merujuk pada karakteristik dan potensi mahasiswa Unsika yang begitu beragam merupakan keunggulan serta kekayaan yang dimiliki oleh institusi yang telah diakomodir oleh universitas ke dalam kebijakan serta berimplikasi kepada kebijakan dan program yang dirumuskan dan implementasikan serta berimplikasi kepada kepemimpinan dan budaya belajar yang terbangun dalam sivitas akademika. Implikasi keempat, dalam hal perancangan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum yang dilaksanakan di Unsika berimplikasi pada proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen juga berimplikasi kepada hasil belajar (*learning outcomes*) yang dicapai oleh mahasiswa Unsika yang masih menghadapi tantangan ditinjau dari lama masa studi dan indeks prestasi kumulatif yang diperoleh mahasiswa.

Implikasi yang kelima, adalah bahwa kebijakan pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen yang dilaksanakan universitas telah berimplikasi pada proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen di kelas. Program-program kebijakan tersebut dapat memberikan gambaran serta kesiapan bagi dosen untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di kelas. Implikasi keenam, di mana program pengembangan yang telah diselenggarakan baik secara formal oleh universitas maupun secara pribadi oleh dosen, tenaga kependidikan dan karyawan institusi telah berimplikasi pada perbaikan secara bertahap pada kapasitas

dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran serta peningkatan kapasitas kerja tenaga kependidikan dan karyawan dalam mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu. Kebijakan penyediaan daya dukung fasilitas belajar yang belum menjadi prioritas kebijakan pimpinan berimplikasi pada masih terdapat kendala dalam hal tata kelola fasilitas belajar mulai dari proses pengadaan sampai pada tata kelolanya, sehingga masih ditemukan fasilitas belajar yang tidak dapat difungsikan secara baik pada saat digunakan dalam mendukung proses pembelajaran di kelas. Tata kelola keuangan universitas dengan status institusi yang masih berstatus satuan kerja merupakan tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan anggaran, berimplikasi pada institusi yang masih belum memiliki keleluasaan serta otonomi dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan proses pembelajaran.

Implikasi ketujuh adalah karena masih terdapat dosen yang menerapkan metode pembelajaran konservatif dimana dosen menempatkan dirinya sebagai satu-satunya sumber belajar, berimplikasi pada proses pembelajaran yang belum menempatkan mahasiswa sebagai manusia dewasa yang mampu mengembangkan dirinya dan potensi yang dimilikinya dengan dosen sebagai fasilitator dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Implikasi kedelapan adalah bahwa masih terdapat dosen yang belum memenuhi prasyarat sebagai dosen profesional sehingga berimplikasi pada perencanaan dan proses pembelajaran yang diselenggarakan menjadi belum sesuai dengan standar proses pembelajaran yang telah distandarkan dan berimplikasi pada mutu proses pembelajaran itu sendiri. Implikasi kesembilan berangkat dari pemahaman dosen yang masih beragam dalam hal sistem evaluasi proses pembelajaran berimplikasi pada sistem, standar acuan penilaian dan instrumen yang digunakan dalam mengevaluasi proses pembelajaran belum terjalinkan keseragaman antar dosen di program studi.

Berdasarkan temuan dan pembahasan terhadap manajemen mutu proses pembelajaran di Unsika, diidentifikasi implikasi kesepuluh di mana dapat dipahami bahwa institusi telah memberikan perhatian pada sistem tata kelola komponen-komponen utama (*essencial componet*) terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu, namun hasilnya masih menghadapi sejumlah kendala dalam memenuhi standar mutu (*quality standard*) yang telah ditetapkan secara maksimal dan

berimplikasi pada belum unggulnya mutu proses pembelajaran yang diselenggarakan institusi serta berdampak pada pencapaian tujuan proses pembelajaran (*learning outcomes*) yang diselenggarakan.

### 5.3. Rekomendasi

Mengacu pada simpulan dan implikasi yang telah dirumuskan, benang merahnya terletak pada bagaimana institusi mengelola secara terpadu seluruh komponen pendukung proses pembelajaran sehingga terselenggara proses pembelajaran yang bermutu. Selanjutnya adalah rekomendasi yang peneliti rumuskan sebagai berikut.

Pertama, kebijakan pimpinan Unsika perlu lebih memprioritaskan kebijakan mutunya (*quality policy*) pada pengembangan infrastruktur pendukung proses pembelajaran yang saat ini kondisinya masih belum memenuhi standar mutu fasilitas belajar yang telah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi, sehingga mampu mendukung percepatan peningkatan mutu proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh universitas.

Kedua, kebutuhan belajar (*learning needs*) mahasiswa perlu menjadi pertimbangan bahkan harus diakomodir oleh institusi dalam perancangan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum sehingga kurikulum yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi mahasiswa sebagai manusia dewasa yang telah memahami kebutuhannya.

Ketiga, kebijakan dan program akademik dan non akademik perlu ditingkatkan intensitas dan kebermanfaatannya dalam mengembangkan minat, bakat, karakteristik dan potensi mahasiswa.

Keempat, dalam proses perancangan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum Unsika harus mengakomodir harapan dan tuntutan pengguna (*user*) lulusan, mengadaptasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), serta mengakomodir kebutuhan dan aspirasi belajar mahasiswa sebagai subjek dalam proses pembelajaran di universitas.

Kelima, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengembangan kompetensi dosen yang telah dilaksanakan, untuk mengukur keberhasilan program dan menilai sejauhmana program-program yang

dilaksanakan oleh institusi sudah sesuai kebutuhan dan untuk mengukur sejauhmana dosen telah mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu di kelas.

Keenam, Institusi harus memfasilitasi serta memberikan penekanan kepada dosen yang belum memenuhi prasyarat dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, seperti kepemilikan jabatan akademik dan kepemilikan sertifikasi sebagai dosen profesional, sehingga memberikan jaminan bahwa proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh seluruh dosen di Unsika memiliki bermutu yang unggul.

Ketujuh, Institusi harus memberikan perhatian yang lebih kepada kebijakan pemenuhan fasilitas pendukung proses pembelajaran, terlebih perhatian dalam hal sistem tata kelola dan perawatan (*maintenance*) fasilitas pembelajaran yang dimiliki, sehingga fasilitas pembelajaran yang tersedia dapat mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu. Institusi juga perlu mengalokasikan anggaran yang proporsional pada alokasi pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen serta alokasi pada penyediaan daya dukung fasilitas pembelajaran yang memadai, bahkan lebih jauh dari pada itu institusi perlu meningkatkan status universitas menjadi universitas (Badan Layanan Umum) BLU bahkan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) sehingga memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan institusi karena kedua komponen ini merupakan komponen utama yang perlu menjadi perhatian dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu.

Kedelapan, perancangan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum harus terlebih dahulu melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan belajar (*learning needs*) mahasiswa, dinamika perkembangan IPTEKS dan harapan (*expectation*) dari *stakeholder* pendidikan. Setelah melakukan inventarisasi kemudian aspek-aspek tersebut harus dianalisa serta diakomodir kedalam perancangan, pelekaksanaan dan pengembangan kurikulum.

Kesembilan, perlu dilakukan sosialisasi yang massif terhadap sistem evaluasi pembelajaran yang telah dirumuskan oleh LPPPM, sehingga tidak terjadi kebingungan serta ketidakseragaman dosen dalam melakukan evaluasi, instrument



yang digunakan bahkan standar penilaian yang dijadikan acuan dalam mengevaluasi proses pembelajaran dilakukan di Unsika.

Perlu diimplementasikannya model manajemen mutu proses pembelajaran berbasis 7 unsur mutu dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di Unsika untuk melakukan percepatan dalam proses peningkatan manajemen mutu lembaga secara umum dan khususnya manajemen mutu proses pembelajaran di Unsika.